



BPKAD
PROVINSI SUMSEL

LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I

TAHUN
2026

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127
Telp. (0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 07 April 2026

Nomor : 700.1.1 / 01787/BPKAD-I/2026

Sifat : Penting

Hal : Undangan

Yth. 1. Pejabat Administrator di Lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pejabat Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

di

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, maka kami meminta Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026

Pukul : 9.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan I TA 2026.

Diharapkan masing-masing bidang membawa Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah,



H. Yossi Hervandi, SE., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 198208162001121004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselfprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselfprov.go.id

NOTULEN

Rapat : Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun Anggaran 2026
Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : 9.00 WIB s.d selesai
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peserta : Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Para Kepala Sub bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Rapat dibuka oleh Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan pengarahan terhadap capaian realisasi masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat maupun Bidang-bidang sampai dengan 31 Maret 2026, serta masalah dan kendala yang dihadapi Sekretariat dan Bidang-bidang dipaparkan sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2026 total anggaran sebesar Rp 3,435,440,907,622.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 31,421,014,275.00 atau 0.91 % .

Anggaran yang dilaksanakan Sekretariat sebesar Rp 130,444,223,754.00 dengan total realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebesar Rp 7,271,449,062.00 atau 5.57 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 903,972,000.00 dengan realisasi sebesar 101,054,950.00.00 atau 11.18 %;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 64,039,604,404.00 dengan realisasi sebesar Rp 5,069,836,162.00 atau 7.92 %;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 270,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 %;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 % ;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 5,412,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 1,194,507,057.00 atau 22.07 %;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 39,007,048,176.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 %;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 4,579,079,174.00 dengan realisasi sebesar Rp 343,099,788.00 atau 7.49 %;

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 13,079,520,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 424,850,605.00 atau 3.25 %;
 9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp 3,186,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 138,100,500.00 atau 4.93 %.
- Faktor Penghambat : tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan , kegiatan yang belum terealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan II.
 - Solusi yang akan dilaksanakan : Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan dalam pencapaian target berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Laporan Progres Terlampir).

B. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyampaikan bahwa total anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebesar Rp 3,250,746,683,868.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 24,007,395,313.00 atau 0.74 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dianggarkan sebesar Rp 1,267,000,000.00 terealisasi sebesar Rp 48,894,809.00 atau 3.86 % dengan rincian Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dianggarkan sebesar Rp 372,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 24,537,809.00 atau 6.60 %;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp 895,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 24,357,000.00 atau 2.72 %;
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 700,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 22,596,964.00 atau 3.23 %;
3. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp 3,248,779,683,868.00 dengan realisasi sebesar Rp 23,935,903,540.00 atau 0.74 % dengan rincian Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 1,716,970,429,335.00 dengan realisasi sebesar Rp 15,000,000,000.00 atau 0.87 %;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi dianggarkan sebesar Rp 1,531,809,254,533.00 dengan realisasi sebesar Rp 8,935,903,540.00 atau 0.58 %.

- Faktor Penghambat :

- a. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD;
- b. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian Belanja Infrastruktur Proses pengadaan barang dan jasa seringkali baru dimulai di pertengahan tahun. Keterlambatan tender ini mengakibatkan pengerjaan fisik tidak selesai tepat waktu (silpa);
- c. Kendala Perencanaan Anggaran Daerah yang Tepat Waktu dalam Pemenuhan Belanja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Belanja Mandatory Spending sering terjadi tarik-ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.

- Solusi yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatkan kualitas mengelola keuangan belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan;
- b. Melakukan evaluasi sub kegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan mandatory spending seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender.

(Laporan Progres Terlampir).

C. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah menyampaikan bahwa total anggaran pada Bidang Perbendaharaan Daerah sebesar Rp 51,000,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 0.00 atau 0.00 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 670,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 % dengan rincian Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp 370,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan sebesar Rp 300,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %
2. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dianggarkan sebesar Rp 50,000,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %;
3. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan sebesar Rp 330,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00.

- Faktor Penghambat : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, Realisasi atas Pemotongan SP2D atas Kas Triwulan I Tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana.
- Solusi yang akan dilaksanakan : Percepatan Proses Realisasi Anggaran. Mempercepat penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat segera melakukan pencairan anggaran di Triwulan I, sehingga mencegah menumpuknya SiLPA di akhir tahun.

(Laporan Progres Terlampir).

D. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa total anggaran Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar Rp 1,121,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 14,813,520.00 atau 1.32 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 336,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %;
2. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp 785,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 14,813,520.00 atau 1.89 % dengan rincian Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dianggarkan sebesar Rp350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp 435,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 14,813,520.00 atau 3.41 %.

- Faktor Penghambat : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target (penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan batas waktu dan peraturan yang telah ditetapkan.
- Solusi yang akan dilaksanakan : mekanisme dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan Update regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan.

(Laporan Progres Terlampir).

E. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan bahwa total anggaran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp 2,129,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 127,356,380.00 atau 5.98 % , dengan rincian Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 400,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 19,687,450.00 atau 4.92 %;

2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 1,025,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 79,423,350.00 atau 7.74 %;
 3. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 703,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 28,245,580.00 atau 4.02 %;
- Faktor Penghambat :
 - a. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.
 - b. Inventarisasi BMD yang belum dilaksanakan, dikarenakan Aplikasi SIPD E BMD yang mengalami kendala
 - c. belum terbentuknya Tim Pengawasan BMD yang telah dilakukan kontrak perikatan pemanfaatan
 - d. proses penertiban memerlukan kerja Tim dan proses litigasi memerlukan waktu yang cukup lama.
 - Solusi yang akan dilaksanakan :
 - a. meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mekanisme dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait Aplikasi SIPD E BMD.
 - c. Percepatan Langkah Strategis Pembentukan Tim Pengawasan BMD
 - d. Optimalisasi Kerja sama Tim dan proses litigasi.

(Laporan Progres Terlampir).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah,



H Yossi Hervandi, SE.,MM., CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127,
Telp. (0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I
TAHUN 2026 BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan	
1.	FERRI YANUAR	SEKRETARIS BPKAD	L		
2	LANRI STIA A	Kesb. POI	L		
3	Febriang	Kab. Palau			
4	S Anthony	Sesb. III			
5	Riyanto	Kesb. alet IH			
6	Angga A	Kesb. Ang II	L		
7	Tulidah	Kesb. Ak. I	P		
8	Silvana Y.	Kesb. Akt. I	P		
9	Sals. k	Kesb. Pauper	L		
10	ANDRI	Kesb. Perben III	L		
11	Ridho	Kesb. Perben II	L		
12	Romy	Kesb. Kemangan	L		
13	M. TOTO	Kesb. Umsec	L		
14	Alan. A	Kesb. Pem. Um	P		
15	Felki Maharani	Kesb. Ang 1	P		

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah,



H. Yossi Hervandi, SE., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 198208162001121004

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENAKSI TRIWULAN I TA 2026
Rabu, 08 April 2026



LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

URUSAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	91		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1		127,641,223,754.00	7,133,348,562.00	5.59
i					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	100%		903,972,000.00	101,054,950.00	11.18
1						Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJIP, Renja Induk, Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi	22	8	903,972,000.00	101,054,950.00	11.18
ii					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	100%		64,039,604,404.00	5,069,836,162.00	7.92
2					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	172	83 ASN dan 72 P3K	62,457,124,404.00	4,884,437,712.00	7.82
3					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	60	15	1,332,480,000.00	155,531,450.00	11.67

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited, LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD, Rekon Akuntansi/Semester, Dokumen Kartu Kendali/semester, RKBMD, Laporan Rekon Per Triwulan , Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	27	1	250,000,000.00	29,867,000.00	11.95
iii					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100		270,000,000.00	0.00	0.00
5					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	1	-	270,000,000.00	0.00	0.00
iv					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100%		350,000,000.00	0.00	0.00
6					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan, Anjab, ABK, Evjab, Penataan Arsip Dinamis)	28	6	250,000,000.00	0.00	0.00
7					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	10	-	100,000,000.00	0.00	0.00
v					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%		5,412,000,000.00	1,194,507,057.00	22.07
8					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	4	-	500,000,000.00	164,595,000.00	32.92
9					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	-	1,010,000,000.00	60,094,000.00	5.95

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	-	1,746,000,000.00	544,535,696.00	31.19
11					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	-	832,000,000.00	193,215,340.00	23.22
12					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	-	40,000,000.00	7,742,000.00	19.36
13					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	3	184,000,000.00	164,996,800.00	89.67
14					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	400	67	800,000,000.00	59,328,221.00	7.42
15					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen (Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	8	-	300,000,000.00	0.00	0.00
vi					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100%		39,007,048,176.00	0.00	0.00
16					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/ Unit	1	-	39,007,048,176.00	0.00	0.00
vii					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100%		4,579,079,174.00	343,099,788.00	7.49
17					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan (1 Laporan per Bulan)	12	3	20,000,000.00	0.00	0.00
18					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	9	1,344,959,174.00	179,448,388.00	13.34
19					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2	3,214,120,000.00	163,651,400.00	5.09
viii					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%		13,079,520,000.00	424,850,605.00	3.25

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	6	2	1,380,000,000.00	170,028,805.00	12.32
21					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	8	288,000,000.00	95,841,800.00	33.28
22					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	2	561,520,000.00	59,310,000.00	10.56
23					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4	-	10,850,000,000.00	99,670,000.00	0.92
II	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	1			WTP (Opini BPK atas Laporan Keuangan)					
		Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026	1.00			Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026					
		Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027	1.00			Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.					

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	5%			Deviasi Realisasi Belanja diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LRA Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.307.020.145,00 atau 7,74% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00					
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	1		3,305,340,683,868.00	24,160,309,333.00	0.73
			25.95%	26,14%	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%					
			36.60%	27,52%	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%					
			2.50%	-	Persentase Penurunan SILPA	%					
			100%	-	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%					
i					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	100		4,070,000,000.00	186,995,309.00	4.59
24					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	0	372,000,000.00	24,537,809.00	6.60

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen (Raperda, Perda, Rapergub, Pergub, Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	8	895,000,000.00	24,357,000.00	2.72
26					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	0	2,803,000,000.00	138,100,500.00	4.93
ii					Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	100		1,036,000,000.00	22,596,964.00	2.18
27					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	34	0	700,000,000.00	22,596,964.00	3.23
28					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	18	0	336,000,000.00	0.00	0.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
iii					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100	1.50	670,000,000.00	0.00	0.00
29					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	44	3	370,000,000.00	0.00	0.00
30					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	179	0	300,000,000.00	0.00	0.00
iv					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	100		785,000,000.00	14,813,520.00	1.89
31					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	0	350,000,000.00	0.00	0.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	0	435,000,000.00	14,813,520.00	3.41
v					<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah</i>	100	0.67	3,298,779,683,868.00	23,935,903,540.00	0.73
33					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	34	1	1,716,970,429,335.00	15,000,000,000.00	0.87
34					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan (Laporan Pencairan)	4	0	50,000,000,000.00	0.00	0.00
35					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	18	1	1,531,809,254,533.00	8,935,903,540.00	0.58
III	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2,18		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	10	2,459,000,000.00	127,356,380.00	5.18
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	6%			%					
		Asset Management	100%			%					
i					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatanganan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	100	10	2,459,000,000.00	127,356,380.00	5.18
36					Penyusunan Standar Harga	Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	1	330,000,000.00	0.00	0.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Kinerja TW I		Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	61	15	400,000,000.00	19,687,450.00	4.92
38					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	76	4	1,025,500,000.00	79,423,350.00	7.74
39					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	20	703,500,000.00	28,245,580.00	4.02
Jumlah : 39 sub kegiatan									3,435,440,907,622.00	31,421,014,275.00	0.91



Palembang, 13 April 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 198208162001121004